

Exploring the Historical Background of the Massacre of Ethnic Chinese in Batavia in 1740

Livia Sanalin^{a*}, Karenina Melinda Putri^b, Rosdiana Septrie Lestari^c, Purwanto Putra^d

^{abcd}Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

*liviasanalin0402@gmail.com

Abstract

Before Batavia turned into Jayakarta, there was an ethnic massacre in the Batavia area, namely in 1740. The purpose of writing this article is to find out the background of the history of the massacre of ethnic Chinese that occurred in 1740. The research method used is the historical method or historical method combined with an intradisciplinary strategy involving the social sciences. In 1740, the Chinese community or ethnic Chinese did a lot of trading in the Batavia area around Tanah Abang and Glodok, a name that is now well known by the Indonesian people. At that time, the Company officials who served in Batavia at that time, and the dissatisfaction of the Chinese people with the policies of the VOC government in Batavia which had peaked before the incident, while the political temperature within the Company itself had also begun to heat up, as well as a conflict of interest between Adriaen Valckenier as Governor General and Gustaaf Willem Baron van Imhoff as Chairman of the Raad van Indië. This policy created a problem for the ethnic Chinese community. It caused a lot of dislike for the policy and eventually led to riots and massacres of ethnic Chinese on October 9-11, 1740 which killed more than 10,000 ethnic Chinese, both inside Batavia and in the surrounding area.

Keywords: Batavia, chinese, VOC

Mengulik Latar Belakang Sejarah Pembantaian Etnis Tionghoa di Batavia Pada Tahun 1740

Abstrak

Sebelum Batavia berubah menjadi Jayakarta, terjadi pembantaian suatu etnis di daerah Batavia, yaitu pada tahun 1740. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui latar belakang dari sejarah pembantaian etnis Tionghoa yang terjadi pada tahun 1740. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode historis atau metode sejarah yang dipadukan dengan strategi intradisipliner yang melibatkan ilmu-ilmu sosial. Pada tahun 1740, masyarakat Tionghoa atau etnis Tionghoa melakukan banyak perdagangan di daerah Batavia disekitar Tanah Abang dan Glodok nama yang sekarang terkenal oleh masyarakat Indonesia. Pada masa itu, para pejabat Kompeni yang bertugas di Batavia pada waktu itu, dan ketidakpuasan orang-orang Cina terhadap kebijakan pemerintah VOC di Batavia yang sudah memuncak menjelang terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan suhu politik di dalam tubuh Kompeni sendiri juga sudah mulai memanas, serta terjadinya konflik kepentingan antara Adriaen Valckenier selaku Gubernur Jenderal dan Gustaaf Willem Baron van Imhoff selaku Ketua Raad van Indië. Dari kebijakan tersebut memunculkan sebuah permasalahan bagi masyarakat etnis Tionghoa. Menimbulkan banyak sekali ketidaksukaan kepada suatu kebijakan tersebut dan akhirnya menimbulkan huru-hara dan pembantaian massal terhadap etnis Tionghoa pada tanggal 9-11 Oktober 1740 yang menewaskan lebih dari 10.000 korban jiwa etnis Tionghoa, baik di dalam Batavia maupun di daerah sekitar.

Kata Kunci : Batavia, tionghoa, VOC

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar, di dalamnya terdapat banyak budaya, suku bangsa dan etnis. Membahas soal etnis, Kata etnos dalam bahasa Yunani, yang berarti rakyat atau bangsa, adalah asal kata etnis secara etimologi. Etnisitas adalah konsep relasional yang terkait erat dengan identitas pribadi dan sosial (Krisbintoro & Cahyadi, 2018). Ada banyak sekali etnis di Indonesia kita, Terlepas dari keragamannya yang besar, budaya Indonesia banyak dibentuk dan dipengaruhi oleh budaya-budaya penting lainnya, termasuk budaya Arab, India, dan Cina. Orang Tionghoa merupakan bagian dari keberagaman bangsa Indonesia yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan (Rasyid et al., 2021).

Etnis Tionghoa merupakan salah satu kelompok etnis yang diterima oleh Indonesia sebagai pendatang. Meskipun tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk berdagang, mereka juga secara halus menyampaikan kepercayaan mereka kepada penduduk asli dan membawa serta aspek-aspek budaya asli mereka. Akibatnya, ada banyak budaya yang hadir di Indonesia dalam hal bahasa, tradisi, dan agama (Hakim & Atmaja, 2020). Pada tahun 1407, Laksamana Cheng Ho menjadi pengunjung Tiongkok pertama yang datang ke Indonesia. Laksamana Cheng Ho melakukan perjalanan ke sejumlah lokasi selama periode tersebut, termasuk Jawa, Samudra Pasai, Aceh, dan Palembang. Setiap lokasi yang dikunjungi Cheng Ho digunakan untuk berdagang dan berdakwah. Meskipun tidak diketahui secara pasti tanggal kedatangan pemukim Tionghoa pertama di Nusantara, namun diketahui bahwa penjelajah dan pedagang Tionghoa sering mengunjungi Jawa pada abad-abad awal era Tiongkok, jauh sebelum Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya berdiri. Periode Masehi. Nusantara, khususnya Jawa, telah terhubung dengan daratan Tiongkok sejak awal abad Masehi, menurut catatan sejarah pelayaran melintasi samudra yang dilakukan oleh Chien Han Shu di bawah Dinasti Han, di antara peristiwa-peristiwa lainnya (Chandra & Wasino, 2015).

Jauh sebelum Belanda, yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen, mengambil alih Jayakarta pada tahun 1619 dan menamainya Batavia (sekarang Jakarta), orang-orang Tionghoa telah membangun tempat tinggal mereka di daerah yang sekarang dikenal sebagai Banten dan beberapa tempat lain di luar Jawa (Purcell 1965: 391) (Dahana, 2000). Ada beberapa tantangan yang terkait dengan keragaman Indonesia. Abad ke-16 menjadi saksi lahirnya hal ini, dan Jan Pieterszoon Coen merasa prihatin dengan meningkatnya jumlah etnis Tionghoa yang kemudian akan menjungkirbalikkan ekonomi lokal. Karena ekonomi VOC masih dalam tahap awal, J.P. Coen merasa tersisih dan harus membeli barang-barang pribumi untuk mengisi kembali rekening banknya. Namun, karena etnis Tionghoa juga terlibat dalam perekonomian ini, muncul pula perasaan bahwa etnis Tionghoa harus dimusnahkan (Wigarani et al., 2019).

Pieter Both mengirim wakilnya Jan Pieterszoon Coen ke Banten pada tahun 1611, ketika ia masih menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC, untuk membeli lada. Coen berkenalan dengan Souw Beng Kong (苏鸣岗; *pinyin: sū míng gǎng*), seorang pedagang Tionghoa yang sangat kaya dan memiliki perkebunan lada yang besar di Banten. Orang Belanda lebih sering menyebutnya Bencon. Untuk mendapatkan harga yang lebih baik, pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Belanda yang ingin membeli produk dari petani Banten harus melakukan tawar-menawar dengan Souw Beng Kong (Lisminingsih, 2012). Dengan menggunakan sebelas kapal junk, 800 pendatang baru tiba di Batavia pada tahun 1686. Tahun-tahun berikutnya jumlah pendatang terus meningkat tanpa terkendali. Akibatnya, VOC memberlakukan berbagai peraturan yang memberatkan para pendatang, namun mereka terus berdatangan, sehingga menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat kota (Kustedja, 2012). Populasi orang Tionghoa melebihi populasi orang Eropa pada abad ketujuh belas. Hanya ada sekitar seribu orang mardijker dan mestizo yang tinggal di sana. Penduduk asli dari berbagai latar belakang etnis yang merdeka juga melakukan hal yang sama. Yang menarik, para budak merupakan bagian terbesar dari populasi. Jumlah penduduk pada tahun 1679 adalah sekitar 16.695 jiwa; 5.654 jiwa tinggal di wilayah timur, 5.709 jiwa di wilayah barat, dan 5.332 jiwa di pinggiran kota (Utama, 2012).

Orang-orang yang tinggal di Batavia ketika Jan Pieterszoon Coen membangun kota ini pada tahun 1619 tidak memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan orang Belanda. Begitu juga dengan orang Tionghoa. Sebelum tahun 1614, orang Tionghoa dilarang oleh perjanjian yang dibuat antara Belanda dan pangeran Jayakarta untuk membangun rumah di dekat loji yang dia dirikan. Namun, banyak orang Tionghoa yang telah membangun rumah dan tinggal di tepi pantai dekat loji, sehingga banyak dari rumah-rumah tersebut yang harus dirobohkan dan direlokasi (Setiono, 2008a). Akhirnya, Coen menghapus peraturan tersebut untuk

merebut hati orang Tionghoa. Namun, orang Tionghoa menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap orang Belanda dan menolak untuk melakukan hubungan dagang (Setiono, 2008a). Mereka juga memboikot Belanda dengan lebih kuat. Para pedagang Tionghoa berhenti menjual produk dagangannya kepada Belanda. Sepatu serdadu Belanda tidak lagi menjadi sesuatu yang ingin diperbaiki oleh orang Tionghoa. Melihat kondisi ini, Coen mulai memahami bahwa untuk mendapatkan dan memengaruhi orang-orang Tionghoa ini, dia harus menggunakan tangan Souw Beng Kong (Lisminingsih, 2012).

Pabrik penggilingan tebu di sekitar Batavia ditutup karena VOC, yang menanggapi kelebihan stok di pasar gula global, yang menyebabkan krisis. Karena populasi Tionghoa di Batavia dikurangi oleh Belanda dan mereka melarikan diri ke wilayah di luar Batavia. Namun, orang Tionghoa menganggap rencana Belanda untuk mengurangi populasi Tionghoa ini sebagai alasan untuk membuang mereka ke laut. Orang-orang Tionghoa sendiri, bagaimanapun, menganggap rencana ini sebagai alibi untuk membuang mereka ke laut (Lisminingsih, 2012). Pada tahun 1740 sebuah peristiwa besar terjadi, yaitu Geger Pacinan, alasan atau latar belakang yang menyebabkan peristiwa ini adalah pembantaian sewenang-wenang terhadap sekitar 10.000 orang Tionghoa di Batavia pada bulan Oktober 1740, yang diperintahkan oleh Gubernur Jenderal VOC Adrian Valckenier. Mereka dianiaya karena melanggar peraturan imigrasi dan perpajakan. Tujuan sebenarnya adalah memeras uang dan menyita aset milik orang-orang Tionghoa." (Adam et al., 2019). Akibat dari adanya peristiwa geger pacinan adalah lebih dari 10.000 orang tionghoa dibantai pada 9-11 Oktober 1740 (Nurhadi, 2008).

Metode

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode historis atau metode sejarah yang dipadukan dengan strategi intradisipliner yang melibatkan ilmu-ilmu sosial. Teknik sejarah dengan bantuan ilmu-ilmu sosial lainnya termasuk ilmu ekonomi, ilmu politik, dan sosiologi, dengan menggunakan pendekatan intradisipliner. Metode historis adalah kumpulan pedoman dan ajaran yang terorganisir yang dimaksudkan untuk membantu mengumpulkan bahan-bahan sejarah, mengevaluasinya secara kritis, dan mensintesis temuan-temuannya yang biasanya disajikan dalam bentuk tertulis. Untuk memudahkan dalam mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan kajian dalam tulisan ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, atau penelitian pengumpulan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber kepustakaan atau publikasi. Sumber-sumber pendukung artikel ini adalah berbagai publikasi ilmiah, jurnal, atau arsip yang dapat dipercaya dan relevan dengan informasi yang diberikan atau temuan penelitian sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Pembantaian Etnis Tionghoa Batavia 1740

Jauh sebelum VOC hadir, para pedagang Tionghoa sudah ada di Jakarta. Beberapa bahkan tinggal cukup lama untuk memproduksi anggur dan tebu, yang merupakan bahan pokok bagi para pelaut. Ketika VOC mulai beroperasi di wilayah ini, mereka juga membangun hubungan yang positif dengan penduduk Tionghoa setempat (Blackburn, 2011). Hubungan baik antara orang Tionghoa dan VOC terus berlanjut di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen (1627-1629) hingga pengunduran diri Coen dari jabatannya beberapa tahun kemudian. Karena hubungan positif yang terjalin antara VOC dan masyarakat Tionghoa, masyarakat Tionghoa pun menghadiahkan medali emas kepada Gubernur Jenderal Jacques Specx. Namun, semua itu berubah ketika semakin banyak imigran Tionghoa yang tiba di Batavia (Wijayakusuma, 2005).

Pada tanggal 21 Mei 1690, pada masa pemerintahan Johannes Camphuijs (1684-1691), sebuah kebijakan yang membatasi imigrasi orang Tionghoa dibentuk. Pada tahun 1690, sebuah aturan yang membatasi imigrasi orang Tionghoa ke Batavia disahkan. Pemerintah Batavia saat itu menyatakan bahwa banyak munculnya geng-geng atau gerombolan orang Tionghoa di Batavia dan mereka tidak meninggalkan Tiongkok sebagai pedagang serta tidak memiliki keterampilan, namun mereka banyak melakukan tipu muslihat, pencurian, penipuan serta tindakan tidak senonoh lainnya. Hingga peraturan Mei 1690 ini pun dibuat oleh pemerintahan

VOC (Vermeulen, 2010). Sejak awal abad ke-18 ada sebuah Peningkatan Penting hubungan perdagangan antara Batavia dan Tiongkok. Namun sayangnya keadaan perekonomian Batavia malah terus memburuk setelah tahun 1725. Pada waktu itu, catatan akuntansi menunjukkan adanya kerugian modal selama beberapa tahun (Vermeulen, 2010).

Seperti yang dikatakan J.L. Blusse pada tahun 1988 yaitu, Penipisan lahan dan sumber daya hutan yang telah berkurang hingga memberi tekanan pada gula serta adanya penurunan ekspor karena penutupan pasar Persia yang biasanya paling menguntungkan. Hal ini membuat orang Cina menderita. Hampir semua pabrik gula di Hindia Belanda dimiliki dan dioperasikan oleh orang Tionghoa, terutama pendatang baru di Batavia, dan sebagian besar masyarakat Tionghoa. Secara langsung atau tidak langsung masyarakat Tionghoa bergantung pada industri tersebut (Remmelink, 2002). Seiring dengan meningkatnya imigrasi orang Tionghoa ke Batavia, VOC menerapkan sejumlah peraturan untuk mengendalikan populasi. Misalnya, pada tanggal 10 Juni 1727, sebuah ketetapan dikeluarkan yang menyatakan bahwa semua penduduk Tionghoa di Batavia yang telah menetap di sana selama sepuluh tahun atau lebih namun tidak dapat menunjukkan izin tinggal akan dikirim kembali ke negara asalnya. Orang Tionghoa mana pun yang tidak memiliki izin tersebut setelah batas waktu yang ditentukan akan dianggap "memasuki atau bersembunyi di koloni secara ilegal dan diam-diam" (Vermeulen, 2010).

Ketidakpuasan dan kekhawatiran atas perlakuan dan peraturan VOC terhadap orang Tionghoa yang tinggal di Batavia muncul pada akhir 1739 dan awal 1740. Pada tanggal 25 Juli 1740, Gubernur Jenderal Adrian Valckenier mengeluarkan keputusan sebagai akibat dari hal ini. Terjadi perpecahan antara komunitas Tionghoa di Batavia dengan mereka yang berasal dari luar akibat pernyataan Gubernur Jenderal tersebut (Vermeulen, 2010). Gubernur Jenderal mengeluarkan perintah yang memerintahkan penangkapan dan interogasi setiap orang Cina yang mencurigakan, terlepas dari status perizinan mereka. Mereka akan dikembalikan ke Cina atau diangkut sebagai budak ke tambang dan perkebunan di Ceylon (Sri Lanka) dan Tanjung Harapan jika diketahui bahwa mereka tidak memiliki uang atau menganggur (Remmelink, 2002). Hal-hal yang tengah menimpah masyarakat Tionghoa saat itu membuat mereka semakin was-was dan panik ketika muncul isu bahwa orang Tionghoa benar-benar dibuang ditengah laut saat menuju ke Sri Langka (Wijayakusuma, 2005).

Pada tanggal 7 Oktober 1740, beberapa suku Tionghoa yang dikomandoi oleh Khe Pandjang dan Wang Tai Pan memberontak karena masalah ini. Pemberontakan orang-orang Tionghoa ini memicu tanggapan keras dari VOC. VOC melihat kebakaran di kios-kios orang Tionghoa pada tanggal 9 Oktober 1740, sebagai awal dari pemberontakan orang Tionghoa, yang mengakibatkan pembakaran rumah, penjarahan, dan pembunuhan orang Tionghoa di Batavia (Setiono, 2008). Dari tanggal 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740, kota ini mengalami lebih banyak pemberontakan. Kondisi di kota ini membaik dan perburuan pemberontak Tionghoa di luar tembok kota berakhir pada bulan November ketika Gubernur Jenderal Valckenier mengeluarkan perintah untuk menghentikan pembunuhan terhadap orang-orang Tionghoa. Tragedi Geger Pecinan atau Angke adalah nama yang diberikan untuk pemberontakan yang kejam ini. Karena pada bencana ini, sekitar 10.000 orang Tionghoa kehilangan nyawa mereka (Wijayakusuma, 2005). Kejadian ini tidak hanya merugikan orang Tionghoa, tetapi juga berdampak buruk pada VOC dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif, baik di dalam maupun di luar tembok kota Batavia. Orang Tionghoa yang masih hidup hanya tinggal di dalam rumah, sehingga hal ini menyebabkan keadaan perekonomian Batavia semakin memburuk.

Selain itu, kejadian ini mengganggu aktivitas pengiriman barang dan mengakibatkan kelangkaan produk dalam jumlah besar di Batavia, karena warga Tionghoa mempunyai kedudukan pedagang dalam sistem perdagangan Batavia. Kejadian ini memaksa VOC untuk mengatasi masalah kesulitan itu sendiri. Namun, hal ini tidak dapat diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya karena situasi yang berat dan kerusakan yang signifikan di Batavia. Pemerintah Hindia Belanda menyadari pentingnya pengaruh budaya Tionghoa di Batavia. Setelah kejadian ini, orang-orang Tionghoa memutuskan untuk tidak lagi tinggal di Batavia dan malah mendirikan kawasan Glodok, yang kemudian menjadi pusat Pecinan di Jakarta. Kerusakan warga Tionghoa di Batavia pada tahun 1740 bukan hanya disebabkan oleh ketidakpuasan warga Tionghoa pada kebijakan pemerintah Kompeni, namun juga banyak dipengaruhi oleh konflik antara keluarga dua Gubernur Jenderal yaitu keluarga Valckenier dan Van Imhoff yang sarat dengan ideology masing-masing (Wijayakusuma, 2005).

Runtutan Pembantaian Etnis Tionghoa Batavia Tahun 1740

Ada dua komunitas Cina terbesar di Indonesia. Kelompok pertama disebut Cina Singkeh, dan terutama terdiri dari imigran Cina yang miskin di Indonesia. Yang kedua adalah Laukeh, yang terdiri dari imigran Tionghoa di Indonesia yang telah berada di sana selama sepuluh hingga dua puluh tahun. Kategori ketiga, yang disebut sebagai Peranakan, terdiri dari orang-orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dari orang tua Melayu (Clockener 2007:86).

Ketika tembok Kota Batavia, yang dikenal sebagai ommelanden, dibangun pada tahun 1650, orang-orang Tionghoa direlokasi ke luar tembok karena struktur administrasi VOC yang tidak memadai pada tahun 1740. Dengan demikian, terjadilah pembantaian terhadap penduduk Tionghoa (Lohanda, 2007b). Ada berbagai keuntungan dari kebijakan ini. Pada awalnya, masyarakat yang berada di luar tembok kota berfungsi sebagai pelindung tembok kota. Selain itu, para pemukim diizinkan untuk membangun perkebunan dan pertanian di dalam batas-batas pemukiman mereka, sehingga memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat ini menjadi swasembada. Pemerintah VOC tidak perlu mengeluarkan uang untuk keamanan di sekitar Batavia karena pasukan Schutterij menjaga keamanan penduduk kulit putih di dalam tembok kota. (Lohanda, 2007).

Terdapat perbedaan antara penduduk Tionghoa di Kota Batavia dan mereka yang tinggal di luar tembok Kota Batavia. Komunitas Tionghoa di luar benteng kota sulit dikendalikan oleh pemerintah VOC karena tidak ada organisasi komunitas Tionghoa seperti yang ada di Batavia. Seorang Kapitan Tionghoa bertugas mengumpulkan pajak untuk VOC saat itu. Mayoritas orang Tionghoa yang tinggal di luar Batavia adalah petani atau kuli di perkebunan gula, dan komunitas Tionghoa hidup dengan tenang. Seperti yang dijelaskan oleh Hoetink dalam tulisannya bahwa :

"Dioedik-oedik Betawi itoe waktu boleh jadi betoel ada mengoembara orang-orang Tionghoa jang tida back. Aken tetapi bagian jang paling besar dari orang-orang Tionghoa jang tinggal disana sebagi orang tani atawa sebagi koeli-koeli dalem penggilingan teboe tentoelah tida harep laen daripada bisa lakoeken pekerdjaannja dengan aman dan sentosa" (Hoetink, 2007).

Mayoritas imigran Tionghoa di Batavia bekerja di pabrik-pabrik gula yang dikelola oleh para pengusaha Tionghoa yang makmur. Tercatat 79 dari 84 pengusaha yang menguasai 130 pabrik gula pada tahun 1710 adalah orang Tionghoa (Lohanda, 2007). Semakin banyak orang Tionghoa yang melakukan perjalanan ke Indonesia, terutama ke Batavia, yang dijuluki "bahaya kuning" karena konsentrasi orang Tionghoa yang tinggi. Jumlah orang Tionghoa yang sangat besar menjadi pendorong keputusan VOC untuk memberlakukan izin tinggal. Komunitas Tionghoa berada di bawah tekanan pejabat VOC, yang menggunakan pemerasan untuk mendapatkan izin tinggal (Clockener 2007:86-87). Karena ada begitu banyak pekerja Cina yang tidak berdokumen di Batavia, maka izin tinggal dibuat sebagai respon (Lohanda, 2007).

Orang Tionghoa di Batavia menerima izin yang berbeda-beda dari VOC. Permissie briefje, yang juga dikenal sebagai izin tinggal, dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1727, untuk mereka yang telah tinggal di Batavia selama sepuluh tahun atau lebih. Pada tanggal 12 Juni 1727, orang-orang Tionghoa yang telah mengunjungi Batavia selama tiga bulan untuk urusan bisnis mendapatkan licentie briefje, dengan imbalan dua riksdelijk. Selain itu, setiap orang yang berencana untuk kembali ke Batavia setelah pulang ke Cina memerlukan izin, yang diberlakukan pada tanggal 10 Juni 1727 (Lohanda, 2007). Penduduk Tionghoa di luar tembok kota Batavia sering menjadi sasaran pemerasan dan intimidasi oleh para pejabat VOC. Menurut Hoetink menguraikan bahwa :

"penangkepan itoe tida patoet adanja dan itoe orang-orang djadi keilangan dalem satoe saat miliknja jang marika telah tjari dalem tempo banjak taon, milik mana diperes dari marika oleh orang-orangnja Commisaris oeroesan orang Boemipoetra jang tambahan lagi tida segan aken bikin roesak kehormatannja marika poenja anak istri Djoega pemerasan dan siksaan-siksaan oleh itoe Commisaris dan penggawe-penggawenja boleh jadi marikatelah terima sadja, tjoba tida" (Hoetink, 2007).

Ketika pabrik gula bangkrut dan menyebabkan banyak kemiskinan, beban masyarakat Cina menjadi sangat besar. Karena menurunnya permintaan gula di pasar Eropa, banyak pabrik gula mengalami kebangkrutan. Semakin banyak orang di Cina yang mengalami kemiskinan, dan banyak dari mereka yang memiliki banyak hutang. Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi miskin dan menjadi perampok (Blusse, 2004). Ketika orang Cina tidak dapat mengatakan apa yang alami mereka kepada orang-orang di pemerintahan mereka, penderitaan mereka semakin bertambah. Dalam tulisannya yang berjudul, "Ni Hoe Kong, Kapitein TIONG HOA di Betawi dalem tahun 1740", Hoetnink menjelaskan bahwa :

"pengadoean-pengadoean tentang kelakoeannja toe Commisaris jang biasanja ada orang jang disajang oleh Gouverneur Generaal boleh jadi telah tida berhasil. Lagipoen pada siapa jang orang koerang senang moesti madjoeken pengadoean pengadocannja? Di oedik-oedik Betawi tida ada bestuur, ambtenaar- ambtenaar, atawa kepala-kepala, pada siapa orang-orang Tionghoa jang diperlakoeken tida patoet bisa sampeken pengadoeannja, tida ada ditaroh di oedik-oedik betawi" (Hoetink, 2007).

Ditemukan bahwa izin tinggal yang diberikan kepada penduduk Tionghoa di Batavia dijual oleh pejabat pemerintah VOC. Penduduk Tionghoa di Batavia akhirnya memberontak karena dideportasi ke Ceylon (Sri Lanka) karena tidak memiliki izin tinggal. Pada tulisannya Hoetnink menyatakan :

"tentang itoe pembrontakan dari orang-orang tionghoa ada ternjata terang, sebab-sebab jang benar dari itoe pembrontakan jalah pertambahan jang leour biasa bexar dari djoemblahnja orang Tionghoa dan pemeresan, teroetama socrat-soerat permisi aken tinggal di Betawi dan perbocatan-perboeatan kedji serta pemerasan waktoe menangkankep orang-orang tionghoa jang aken dikirim ke Ceylon" (Hoetink, 2007).

Pada saat itu, beberapa orang Tionghoa mulai mencoba menghasut rekan-rekan mereka untuk memberontak melawan penguasa VOC. Selain itu, ada cerita bahwa orang-orang yang seharusnya dikirim ke Ceylon, atau Sri Lanka, akan tenggelam di tengah lautan dan tidak pernah sampai (Lohanda, 2007).

"Kerna gampang pertjaja, marika telah pertjaja bahoea orang-orang Tionghoa jang ditangkankep dalam perdjalananan ke Ceylon dilempar ke laoet. Pikiran bahoea marika poen bisa dapat ini nasib, ditambah dengan rasa kesian boeat sesamanja bangsa Jang soeda dapet itoe nasib, telah bikin itoe rasa koerang senang djadi kemoerkaan besar, rasa takoet djadi nekat".

Komunitas Tionghoa mempersenjatai diri dan bersiap-siap untuk memerangi VOC setelah dipicu oleh masalah tersebut. VOC memperkuat kebijakannya setelah menjadi semakin marah kepada komunitas Tionghoa setelah menyaksikan tindakan berani mereka. Kemudian, Gubernur Jenderal Valckenier meminta Parlemen untuk menangani masalah ini. Terlepas dari apakah mereka memiliki izin tinggal atau tidak, orang-orang Cina yang dianggap sebagai tersangka harus ditangkap, menurut keputusan yang dibuat pada pertemuan Parlemen 25 Juli 1740. Mereka yang tidak dapat menunjukkan dokumen pekerjaan tetap akan dideportasi ke Sri Lanka. Raad van Indië mengumumkan bahwa siapa pun yang dapat membunuh orang Tionghoa di luar kota akan menerima dua dukat untuk setiap kepala orang Tionghoa, bahkan di bawah perintah Valckenier (Lohanda, 2007). Langkah drastis ini dilakukan sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang disuarakan mengenai konspirasi dan pemberontakan Pieter Eberveld terhadap kekuasaan VOC (Shahab, 2002).

Orang-orang Tionghoa kemudian mempersenjatai diri mereka sendiri dan mengorganisir diri sebagai kelompok perlawanan bersenjata. Oey Panko, yang kemudian disebut Khe Panjang, memimpin perlawanan orang Cina di ommelanden. Karena tidak ada pejabat pemerintahan VOC di perkampungan, pemerintah VOC pada awalnya tidak mengetahuinya. Kurangnya aparat pemerintah memungkinkan orang-orang Tionghoa di kampung-kampung Batavia dengan cepat menguasai wilayah di luar benteng Batavia, seperti di dalam tulisannya, Hoetnink menjelaskan :

"Di bedik oedik Betawi ini kawanan peroesoch bisa berlakoe dengan leloeasa. Kerna disitu tida ada bestuur, maka pemerintah tida dapet taoe tentang apa jang ada terdjadi. Pemerintah baroe insaf bahaja jang mengantjem dari oedik-oedik itoe tatkala itoe gerakan berontak soeda djadi begitoe besar hingga djalannja bisa ditjegah melaenken dengan kekoetaan sendjata" (Hoetink, 2007).

Orang-orang Cina tidak memiliki senjata yang sangat bagus. Meskipun memiliki senjata yang lebih sederhana, mereka adalah kelompok yang cukup besar. Kota-kota di Batavia diserbu oleh penduduk Tionghoa yang jumlahnya cukup besar, yang juga menghancurkan tentara dan pos-pos yang dikirim ke sana untuk mengatasi pemberontakan. Pada karya nya, Hoetnink menjelaskan hal berikut ini :

"Orang-orang Tionghoa jang brontak betoel djoega tida bisa menoeroet prentah dan sendjatanja djelek, aken tetapi djoemblahnja ada besar sekali. Dengan leloeasa marika bisa. meradjalela di oedik-oedik seraja membakar dan membinasakan. Dan, sesoeda marika rampas bebrapa post jang lemah pendjagaannya serta basmi orang-orang militair jang dikirim boeat moendoerkan marika, la orang djadi brani boeat mnenjerang djoega pada pintoe-pintor kota Betawi" (Hoetink, 2007).

Pemberontakan ini dengan cepat diredam oleh pemerintah VOC, sehingga serangan komunitas Tionghoa Batavia tidak sampai ke kota. Hoetink 2007:14) menjelaskan bahwa :

"Dalem perklainan mana betoel djoega orang Tionghoa tentoe tida aken bisa menang melawan tentaranja Kompeni, tetapi toch perklainan itoe tentoe membawa kesoedahan- kesoedahan jang jilaka djoega pendoeoek europa dalem itoe kota Kerna pemerintah telah berlakoe awas maka tida sampe kedjadian begitoe".

Pasukan pemberontak tidak dapat mencapai Batavia. Banyak penduduk Eropa di Batavia mengira bahwa orang Tionghoa yang tinggal di dalam kota mendukung dan membantu pemberontakan Tionghoa. Kesan ini berkembang sebagai akibat dari kurangnya keberanian masyarakat Tionghoa untuk menentang pemerintah; tanpa bantuan mereka, pemberontakan tidak akan terjadi. Dalam hal ini Hoetnink menggambarkan:

"sementara itoe bisa dimengerti jang pendoeoek europa di Betawi telah pertjaja tentang adanja soeatoe persekoetoean dari pendoeoek Tionghoa. Bagi itoe pendoeoek Europa ampir tida bisa dipertjaja Jang satoe bangsa, jang selalu dipandang sebagai bangsa jang paling pengetjoet dalem ini doenia, telah ada mempoenjal keberanian aken deketin kota Betawi dan menjerang pasoeakan-pasoeakan djaga di loear pintoenja itoe kota. Maka gampang sadja orang mendoega bahoera si penjerang-penjerang dari locar pertjaja pasti jang marika aken dapet bantoean dari bangsanja didalem kota, hingga didalem kota tentoe aken dilakoekan serangan, apabila serangan dari loear jang telah dipekoel moendoer dioelangkan sekali lagi" (Hoetink, 2007).

Karena khawatir dengan keterlibatan mereka dalam pemberontakan, Gubernur Jenderal VOC Adriaan Valckenier menyatakan bahwa semua orang Tionghoa, termasuk yang tinggal di Batavia, harus dipandang sebagai musuh otoritas VOC. Menurut (Hoetink, 2007) menjelaskan:

"Kekoeatiran jang dalem kota aken petjah pembrontakan, telah bikin Gouvernour Generaal Valckenier menanja, bagimana orang moesti berlakoe apabila terdjadi itoe pembrontakan, dan itoe Gouverneur- Generaal menjataken lebih djaoe, selandjoetnja semoea orang Tionghoa moesti dipandang seperti mosoehnja pemerintah dan teroetama haroes dibersihken kota Betawi dari orang Tionghoa, soepaja bisa melawan moesoeh dari locar".

Jelaslah bahwa Gubernur Jenderal Valckenier memiliki sudut pandang yang sama dengan para perantara Eropa di Batavia. Pada saat itu diyakini bahwa penduduk Tionghoa di Batavia yang tinggal di luar batas kota bekerja sama dengan penduduk setempat untuk menimbulkan kepanikan. Karena kecemasan ini, masyarakat Tionghoa di Batavia menjadi bermusuhan dan penuh kebencian. Hoetnink menyatakan bahwa :

"Ini pikiran dari itoe Gouvernuer Generaal jang tentoe telah diketahoei djoega oleh pendoeoek europa, tentoe sadja tida bisa bikin ilang itoe orang-orang europa poenja rasa tida slamat, tida bisa koerangken marika poenja

kekoatiran jang orang-orang Tionghoa didalem kota aken lakoeken serangan. Sebaliknja itoe pikiran- pikiran tentoelah membantoe aken. membangoenken perasaan bermoesoch pada pendoeboek Tionghoa" (Hoetink, 2007).

Diskusi mengenai hal ini di antara sejumlah besar orang non-Cina pada akhirnya menghasilkan permusuhan timbal balik dengan orang-orang Cina. Mereka mengatakan bahwa semua orang non-Cina akan dibunuh oleh sebuah skema oleh orang Cina, yang juga akan memperkosa wanita dan menjadikan mereka dan anak-anak mereka sebagai budak, mantan pekerja Untuk menyingkirkan komunitas elit Cina Batavia, bahkan para budak pun bersatu. Pada tanggal 9-10 Oktober 1740, di Batavia, terjadi pembantaian massal terhadap penduduk Tionghoa karena meningkatnya sentimen anti-Tionghoa di kota itu (Benny G. Setiono, 2008).

"Bagimana pada 9 October dan hari- hari jang berikoetnja, matros-matros dan laen-laen orang dari golongan rendah, antara siapa ada djoega soldadoe-soldadoe, orang-orang preman, orang-orang Boemipoetra, dan boedak-boedak telah lakoeken pemboenochan besar antara orang- orang Tionghoa, hingga dalem tempo 24 djam sadja kota Betawi soeda disapoe bersih dari orang-orang Tionghoa, bagimana roemah- roemahnja orang tionghoa telah dirampok dan dibakar, bagimana orang-orang Tionghoa jang ada di dalem pendjara diboenoeh dengan sabar dan sampepoen orang-orang tionghoa jang lagi dirawat dalem roemah sakit dibiarken sadja diboenoeh itoe semoea kekedjaman bisa dibatja dalem laen-laen boekoe".

Kejadian pembantaian masal tersebut juga disebutkan dalam harian Selomporet Melajoe (1902):

"sekalian roema orang Tjina dibakar miliknja dirampas dan orangnja diboenoeh. Dari kiri kanan marika itoe dikedjar dan dipoekoel di djalan besar seperti anding. Sambil bersoerak bangsa Oelanda binasaken moesoenja itoe jang tiada sala sesoetoe apa. Brapa ratoes orang Tjina jang ditawan, soedah dipotong kepalanja seperti binatang. Dalem semoea roema h orang Tjina ada banjak mati. Orang Tjina jang lagi berobat diruemah sakitpoen dikloearkan dari pembaringannja, ia laloe dipenggal batang lehernja. Toea moeda, orang perempuan dan anak- anak tiada satoe dapet ampoen. Maka dalem seketika sadja aer kali soeda penoe dara. Troes tiga hari lamanja rahajat Tjina di Betawi soeda diboenoeh, dlatan hari lamanja dari tanggal 11 hingga 19 October maitnja marika itoe dilempar ke dalem kali Tjiliwoeng, sebagian dimakan boewaja teroes anjoet ke laoet".

Rumah-rumah orang Tionghoa diserbu oleh tentara Belanda, pelaut, pengrajin, kuli, dan budak setelah harta benda mereka disita. Mereka membantai setiap orang Tionghoa yang mereka temui, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau bayi. Darah mengalir di mana-mana, dan rumah-rumah orang Tionghoa dibakar. Banyak mayat orang Tionghoa menumpuk di Rawa Bangke, yang sekarang dikenal sebagai Rawa Bunga, di Jatinegara. Istilah "Kali Angke" merujuk pada sungai yang berwarna merah, yang menjelaskan mengapa sungai yang menyandang nama ini menumpuk begitu banyak mayat. Nama Tanah Abang, yang diterjemahkan menjadi "tanah merah", mengacu pada kuburan massal warga Tionghoa di sana (Benny G. Setiono, 2008).

Sekitar pukul lima sore, pasukan VOC dan marinir mengepung dan menembaki pemukiman Tionghoa di wilayah Roa Malaka dengan menggunakan meriam. Tentara VOC menembak beberapa orang Tionghoa yang terjebak di dalam rumah ketika mereka berusaha melarikan diri. Tentara VOC yang menunggu dengan perahu kecil membunuh siapa saja yang mencoba berenang melalui saluran air dan kanal kota. Sementara itu, sebagian besar kasus bunuh diri dilakukan dengan cara melompat ke dalam kobaran api yang menghancurkan rumah mereka. Di mana-mana, orang-orang Tionghoa terbunuh. Mereka yang dirawat di rumah sakit atau dipenjara dibawa pergi untuk dibunuh oleh orang Eropa, penduduk asli pribumi, dan orang kulit hitam (budak) (Benny G. Setiono, 2008).

Pembantaian tersebut merenggut nyawa sekitar 10.000 orang Tionghoa Batavia, dan beberapa di antaranya melarikan diri ke Tangerang Banten dan Jawa Tengah. Ada 3.431 orang Cina yang masih tersisa. Agar pemerintah VOC dapat dengan mudah mengawasi penduduk Batavia, mereka diharuskan tinggal di tempat khusus di luar batas kota. Pusat perdagangan Glodok sekarang berada di tempat berkumpulnya masyarakat Cina (Benny G. Setiono, 2008).

Dampak Dari Pembantaian Etnis Tionghoa 1740

Geger Pacinan atau tragadi angke memengaruhi banyak hal. Karena peristiwa di Batavia berkontribusi pada perlawanan etnis Tionghoa yang lebih besar terhadap VOC di Semarang dan Rembang, yang dikenal sebagai Perang Kuning, yang berlangsung hingga 1743. Di bawah ini adalah efek geger pacinan dalam berbagai bidang:

1. Bidang Ekonomi

Di sini, penting untuk disadari bahwa Tragedi Angke sempat menghentikan pasokan produk di Batavia, yang menyebabkan kelangkaan barang pokok, termasuk kelangkaan makanan. Di Batavia, peristiwa ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kelaparan. Lebih jauh lagi, ketika pemberontakan Tionghoa terus berlanjut di Jawa, upaya pemerintah untuk mengurangi kelaparan dengan meminta impor beras gagal (Amsia & Syaiful, 2013). Untuk Belanda, Geger Pacinan mengurangi produksi gula Batavia. Karena itu, banyak orang Tionghoa dari etnis Tionghoa yang dulunya bekerja di industri tersebut menjadi korbannya. Namun, permintaan gula di Eropa meningkat sejak tahun 1705, menarik minat imigran Tionghoa untuk bekerja di industri gula. Namun, ketika "gula" kehilangan popularitasnya karena persaingan harga gula di Hindia Barat dan Benggala, serta jatuhnya Sofi di Persia, yang pada saat itu merupakan pelanggan kompeni, perdagangan dalam sektor gula benar-benar terganggu. Banyak pabrik gula bangkrut. Situasi ini menyebabkan banyak orang pengangguran (Suratminto, 2004). Namun, proses implementasi dan hasilnya tidak memadai karena tingginya harga komoditas dan kelangkaan komponen penting yang diperlukan untuk menghidupkan kembali perusahaan-perusahaan ini. Peristiwa Angke juga menurunkan pendapatan pacht, atau pajak, Batavia karena banyaknya petani penggarap Tionghoa yang terlibat. Beberapa hiburan tertentu, seperti pajak kepala, perjudian, dan sabung ayam, tidak dapat dipertahankan karena menurunnya jumlah penduduk Tionghoa. Semua pajak yang dikenakan pada warga Tionghoa oleh VOC mengalami penurunan pendapatan antara tahun 1740 dan 1741. Selain itu, karena jumlah warga Tionghoa yang lebih sedikit, beberapa pajak, seperti pajak kepala, tidak dapat diberlakukan kembali (Amsia & Syaiful, 2013).

2. Bidang Sosial-Budaya

Gula, barang ekspor utama VOC ke Eropa, mengalami penurunan harga sebelum peristiwa Geger Pacinan pada tahun 1740, yang memicu krisis keuangan bagi kongsi dagang Belanda. Hal ini mengganggu masyarakat Tionghoa miskin yang dipekerjakan di pabrik gula. Setelah peristiwa Geger Pacinan di Batavia pada tahun 1740, gelombang besar pengungsi Tionghoa mencari tempat yang aman di Lasem. Oei Ing Kiat, raja muda Lasem Tumenggung Widyaningrat, menyambut mereka dan memberikan izin untuk mendirikan beberapa perkampungan baru. Peristiwa geger pacinan membuat penduduk Lasem memutuskan untuk memberontak melawan Belanda, dan mereka memilih tiga pemimpin: Raden Ngabehi Widyaningrat (juga dikenal sebagai Oei Ing Kiat), Tan Kee Wie, dan Raden Panji Margono. Tan Pan Ciang, seorang babah (keturunan Jawa-Tionghoa), adalah identitas fiktif Raden Panji Margono. Di sisi lain, Khe Pandjang memimpin para pengungsi Tionghoa keluar dari Batavia (Fuad, 2013).

Pecinan terpecah menjadi beberapa kawasan di Batavia, termasuk Asemka, Glodok, Pancoran, Passer Baroe, Pasar Tanah Abang, dan Petak Sembilan, setelah pembunuhan 10.000 etnis Tionghoa pada tahun 1740. Ini merupakan efek sosial tambahan. Setelah pemindahan pusat kota Batavia ke Weltevreden pada awal abad ke-19, sebuah lingkungan baru yang dikenal sebagai Pecinan muncul. Salah satu bagian dari Pecinan Meester Cornelis Senen (Jatinegara). Setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi di Batavia pada tahun 1740, lingkungan Pecinan tersebar di seluruh kota. Salah satu sisa-sisa kawasan Pecinan yang tersisa adalah Jatinegara. Kawasan Meester Jatinegara memiliki sejarah dan aktivitas manusia yang unik. Berbeda dengan kawasan perdagangan Pecinan lainnya, Meester Jatinegara dikuasai oleh ekonomi kelas menengah kebawah. Kawasan Pecinan Meester tidak hanya dikenal sebagai tempat permukiman etnis Tionghoa, tetapi juga dipenuhi dengan masyarakat dari berbagai etnis yang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, yang menghasilkan simbiosis yang menarik (Astuti et al., 2020).

Selanjutnya, bidang budaya mengalami akulturasi anatar dari penduduk Betawi dan Tionghoa. Akulturasi terjadi, menurut (Dianty, 2017), sebagai berikut: Rumah tradisional keturunan Betawi adalah alat yang digunakan oleh etnis Tionghoa untuk bersembunyi dari kejaran VOC. Mereka membuat rumah mereka

dengan menggunakan bahan-bahan lokal untuk menyerupai gaya hidup tradisional Betawi. Rumah tradisional keturunan Betawi tidak menggunakan banyak hiasan yang biasanya ditemukan di rumah tradisional Tionghoa. Sebaliknya, mereka menggambarkan rumah tradisional Betawi yang paling sederhana, lalu rumah tradisional ini dibagi menjadi bagian yang sama seperti rumah tradisional Betawi. Mereka juga menambahkan meja abu, ciri khas rumah tradisional Tionghoa yang digunakan untuk sembahyang. Mungkin dikatakan bahwa akulturasi antara arsitektur tradisional Betawi dan Tionghoa seimbang karena, meskipun rumah-rumah ini digunakan sebagai topeng atau alat penyamaran etnis Tionghoa, mereka tetap memiliki elemen-elemen yang sangat mencirikan arsitektur tradisional Tionghoa, seperti ruang meja abu dan penambahan sumur udara.

3. Bidang Politik

Akibat pembantaian di Batavia, banyak perselisihan etnis Tionghoa muncul di bidang politik. Perang Lasem adalah salah satunya. Gerakan perlawanan terhadap penjajah Belanda diprakarsai oleh masyarakat Lasem, santri, dan etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Amangkurat IV (1717-1726). Pada tahun 1740, orang Cina melakukan perlawanan besar-besaran terhadap VOC di Batavia. Peristiwa Angke menelan ribuan orang. Hal ini berkaitan dengan pembantaian orang Tionghoa di Batavia; setelah terjadi kerusuhan di Kartasura, Ngawi, dan kota-kota lain di Jawa Tengah pada tahun 1741, lebih dari 1.000 orang Tionghoa dari Batavia melarikan diri dan berlindung di Lasem. Tumenggung Oei Ing Kiat menampung para pelarian dari Angke dan memberikan mereka izin untuk mendirikan dusun baru di tepi sungai Pereng, Soditan, dan Kamandung (Karangturi) (Atabik, 2016). Karena tidak senang dengan VOC, para pengungsi Tionghoa dan penduduk Lasem bersatu untuk memberontak melawan penjajah Belanda. Mereka akhirnya memilih tiga pemimpin pemberontakan: Raden Panji Margono, yang menyamar sebagai Babah Tan Pan Ciang, seorang tukang bata yang baik hati bernama Babah Tan Kwe Wie, dan Raden Ngabehi Widyaningrat, yang juga dikenal sebagai Oei Ing Kiat. Dari darat dan laut, Belanda diserang. Tan Kwe Wie memimpin penyerangan laut, sedangkan Raden Panji Margana dan Raden Ngabehi Widyaningrat memimpin penyerangan jalan kaki. Majapahit menghadapi situasi di pantai utara selama berabad-abad dengan menggabungkan taktik pertempuran laut dan darat, pertama-tama merebut pelabuhan atau pantai dan kemudian menyerang pusat kota musuh (Septyana, 2012).

Simpulan

Hubungan yang baik antara orang Tionghoa dan VOC terus berlanjut di bawah Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen, hingga pengunduran diri Coen beberapa tahun kemudian. Karena hubungan baik antara VOC dan masyarakat Tionghoa, orang Tionghoa pun menghendaki medali emas kepada Gubernur Jenderal Jacques Specx. Namun, segalanya berubah ketika semakin banyak orang Tionghoa yang datang ke Batavia. Karena sistem pemerintahan VOC yang buruk pada tahun 1740, penduduk Cina ditempatkan di luar tembok Kota Batavia, yang disebut ommelanden, setelah dibangun pada tahun 1650. Akibatnya, penduduk Cina dibantai. Geger Pacinan atau tragedi Angke memengaruhi banyak hal. Karena peristiwa di Batavia berkontribusi pada perlawanan etnis Tionghoa yang lebih besar terhadap VOC di Semarang dan Rembang, yang dikenal sebagai Perang Kuning, yang berlangsung hingga 1743, dampak dari peristiwa ini berdampak pada bidang ekonomi, sosial-budaya dan juga pada bidang politik.

Referensi

- Adam, A. W., Kusumaningtyas, A. N., Gayatri, I. H., Ekawati, E., Sinaga, L. C., & Rozi, S. (2019). *Tionghoa dan Ke-Indonesia-an Komunitas Tionghoa di Semarang dan Medan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Tionghoa_dan_Ke_Indonesia_an/lcNcDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Amsia, Y. A., & Syaiful. (2013). Pengaruh Terjadinya Tragedi Angke Tahun 1740 Terhadap Bidang Sosial Ekonomi Di Batavia. *Pesagi Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 1(6).
- Astuti, D., Hardiman, G., & Rukayah, R. S. (2020). Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pecinan Meester Jatinegara Berbasis pada Aktivitas Ekonomi. *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*.

- Atabik, A. (2016). PERCAMPURAN BUDAYA JAWA DAN CINA: Harmoni dan Toleransi Beragama Masyarakat Lasem. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/sabda.11.1.1-11>
- Benny G. Setiono, B. G. (2008). *Tionghoa dalam pusaranpolitik*. TransMedia.
- Blackburn, S. (2011). *Jakarta : Sejarah 400 Tahun*. Masup Jakarta.
- Blusse, L. (2004). *Persekutuan Aneh, Pemukim Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC*. Penerbit LKIS.
- Chandra, eptian A., & Wasino, B. (2015). Perkembangan Agama Islam di Kalangan Etnis Tionghoa Semarang Tahun 1972-1998. *Journal of Indonesian History*, 4(1), 53–59.
- Dahana, A. (2000). Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia. *Wacana*, 2(1).
- Dianty, G. P. (2017). Arsitektur Tradisional Rumah Betawi Keturunan. *Jurnal Arsitektur (SCALE)*, 5(1), 56–65.
- Fuad, F. (2013). *ristiwa Chinesetroubelen Di Batavia*. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. 12(2), 29–37.
- Hakim, M. I., & Atmaja, H. T. (2020). BUDAYA, EKONOMI, DAN AGAMA ETNIS TIONGHOA DI SEMARANG TAHUN 1959 - 2000. *Journal of Indonesian History*, 9(2), 128–133.
- Hoetink, B. (2007). *Ni Hoe Kong, Kapitein TIONG HOA di Betawi dalem tahun 1740*. Penerbit Masup.
- Krisbintoro, S., & Cahyadi, R. (2018). Etnis dan Perempuan di Aras Lokal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(1), 1–10. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/13672>
- Kustedja, S. (2012). Jejak Komunitas Tionghoa dan Perkembangan Kota Bandung. *Jurnal Sosioteknologi*.
- Lisminingsih, S. (2012). Analisis kehidupan masyarakat Tionghoa suku Totok dan Tionghoa peranakan pada abad 17 di Batavia. *Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 3(2).
- Lohanda, M. (2007a). *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*. Komunitas Bambu.
- Lohanda, M. (2007b). *Tragedi Seorang Kapitan Cina", dalam Hoetnik, Ni Hoe Kong, Kapitein Tiong Hoa di Betawi dalem Tahun 1740*. Penerbit Masup.
- Nurhadi. (2008). Pembunuhan Massal Etnis China 1740 dalam Drama Remy Sylado : Kajian New Historisisme. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Rasyid, H., Matheosz, J. N., & Deeng, D. (2021). Kehidupan Sosial Budaya Etnis Tionghoa di Kota Manado. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, 14(4), 1–18.
- Rommelink, W. G. J. (2002). *Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa, 1725-1743*. Bukit Jendela.
- Septyana, N. H. (2012). Sejarah Perkembangan Klenteng Gie Yong Bio Di Lasem Dan Pengaruhnya Masyarakat 1967– 1998. *Journal of Indonesian History*, 1(2).
- Setiono, B. G. (2008a). *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. TransMedia. https://books.google.co.id/books/about/Tionghoa_Dalam_Pusaran_Politik.html?id=CH0p3zHladEC&redir_esc=y
- Setiono, B. G. (2008b). *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Transmedia.
- Shahab, A. (2002). *Betawi Queen of The East*. Penerbit Republika.
- Suratminto, L. (2004). Pembantaian etnis cina di batavia 1740: dampak konflik golongan. *Wacana Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, 6(1), 1–26.
- Utama, W. S. (2012). Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Tionghoa di Batavia 1900an-1930an. *Lembaran Sejarah*, 9(1), 19–38.
- Vermeulen, J. (2010). *Tionghoa di Batavia dan Huru-hara 1740 (diterjemahkan oleh Gatot Triwira)*. Komunitas Bambu.
- Wigarani, L., Bain, & Witasari, N. (2019). Kerusuhan Anti Tionghoa di Semarang Tahun 1980. *Journal of Indonesian History*, 8(2), 113–120.
- Wijayakusuma, H. (2005). *Pembantaian massal 1740 : Tragedi berdarah Angke*. Pustaka Populer Obor.

